





SISTEMATIKA

BAB I : PENGENALAN DAN PENJELASAN VISI

**BAB II : OVERVIEW KABUPATEN LOMBOK BARAT:
MASALAH DAN ISU STRATEGIS**

BAB III : MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM AKSI PRIORITAS DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

BAB V : PRIORITAS KINERJA 99 HARI PERTAMA

BAB VI : PENUTUP DAN MOHON DOA RESTU

BAB I

PENGENALAN DAN PENJELASAN VISI

VISI RPJPD LOMBOK BARAT TAHUN 2025-2045 :

**“LOMBOK BARAT BERDAYA SAING, MAJU
DAN BERKELANJUTAN”.**

VISI HJ. SUMIATUN – IBNU SALIM

“LOMBOK BARAT HEBAT”

(HARMONI, EFEKTIF, BERKELANJUTAN, AMANAH dan TERDEPAN)

PENJELASAN VISI

1. LOBAR YANG HARMONI

Harmoni adalah kondisi atau hubungan serasi antar komponen berbeda untuk membangun keselarasan, tercipta relasi sosial yang damai, rukun dan aman, tanpa ada diskriminasi SARA, serta terbangun relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, toleransi dan kebersamaan tinggi untuk memperbaiki bersama taraf hidup dan kesejahteraannya.

Dalam konteks pembangunan, harmoni bermakna sebagai ungkapan rasa, gagasan, aksi dan minat untuk terikat secara serasi, selaras, seimbang dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan antar pihak, antar sektor, antar gender, antar ruang, dan antar generasi.

2. LOBAR YANG EFEKTIF

Merujuk pada tindakan, metode, atau proses mencapai sasaran, tujuan dan hasil akhir yang direncanakan secara tepat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, efektif dan efisien adalah proses dan ikhtiar mencapai tujuan pembangunan dengan hasil dan target yang ditentukan dengan tepat waktu, sembari pembiayaan pembangunan juga dijalankan dengan cermat dan berdaya guna dengan mengeluarkan biaya (*cost*) yang hemat dan tidak berlebihan.

3. LOBAR YANG BERKELANJUTAN

Prinsip utama mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang sekaligus pada masa depan secara berkelanjutan. Keberlanjutan juga merujuk pada ikhtiar untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan saat ini dengan mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial secara bijak tanpa mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan. Pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya juga.

4. LOBAR YANG AMANAH

Amanah adalah salahsatu nilai mulia dalam Islam yang memiliki makna kepercayaan, tanggung jawab dan integritas. Amanah juga didefinisikan sebagai kepercayaan kepada pimpinan untuk menjaga, mengurus dan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dalam relasi sosial, amanah merupakan landasan utama yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat dan pemimpinnya. Nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, dan keuletan adalah beberapa prinsip yang mendasari amanah, yang dapat menumbuhkan kepercayaan antara pihak yang terlibat.

5. LOBAR YANG TERDEPAN

Terdepan merujuk pada posisi atau kondisi yang berada di garis terdepan atau yang paling maju dalam berbagai bidang.

Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah yang harus diikhtiarkan terus bergerak dinamis tanpa lelah, tidak pernah berhenti bergerak, penuh semangat dan inspirasi, tidak terjebak pada kebekuan dan tidak akan pernah berhenti pada titik tertentu dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Menjadi daerah terdepan dinilai memiliki banyak hal yang paling unggul, inovatif, berdaya saing, inspiratif dan progresif. Menjadi terdepan adalah pertanda keunggulan, keberanian, dan kemajuan dalam menggunakan kekuatan dirinya, memanfaatkan peluang, mengatasi kelemahan sembari menghadapi tantangan. Memiliki daya saing kuat sehingga mampu berjalan tegak berhadapan dengan persaingan.

LIMA SASARAN VISI LOMBOK BARAT HEBAT TAHUN 2025-2029:

1. HARMONI.

- a. Harmoni sosial. Membangun rasa kebersamaan dan toleransi antarkelompok sosial, budaya, dan agama dengan menghargai perbedaan dan mempromosikan dialog antar-budaya.
- b. Harmoni ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dimana semua warga menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata. Serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan lingkungan.
- c. Harmoni lingkungan. Mengimplementasikan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, menjamin kelangsungan ekologis, dan menjaga kualitas lingkungan untuk kesejahteraan generasi masa depan.
- d. Harmoni politik. Setiap warga berpartisipasi aktif dan inklusif dalam proses politik, pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua.
- e. Harmoni budaya. Menjaga, menghargai dan melestarikan keberagaman budaya, menghormati nilai-nilai tradisional serta penghargaan terhadap budaya lokal, sehingga menciptakan rasa persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman.

2. EFEKTIF

Visi ini berorientasi pada pencapaian kinerja yang maksimal dengan meminimalkan pemborosan sumber daya, waktu, biaya dan prosedur serta mencapai tujuan dengan cara cepat, tepat, dan hemat.

- a. Peningkatan kinerja dan produktivitas
- b. Pengelolaan sumber daya yang optimal
- c. Simplifikasi dan inovasi proses kerja
- d. Peningkatan kualitas layanan publik
- e. Pengembangan sumber daya manusia dan membangun budaya kerja cepat, tepat dan koaboratif
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi

3. BERKELANJUTAN

Pencapaian tujuan jangka panjang dengan tujuan menjamin kelangsungan kesejahteraan dan kualitas hidup untuk generasi sekarang dan masa depan.

- a. Pencapaian keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan
- b. Pengelolaan sumber daya alam secara bijak
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
- d. Pengurangan emisi dan polusi
- e. Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang komprehensif untuk melindungi masyarakat dan ekosistem dari dampak negatif perubahan iklim.
- f. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat
- g. Pengelolaan pembangunan yang tanggung jawab

4. AMANAH:

Sasaran visi ini merekomendasikan pada integritas , akuntabilitas, kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sehingga kepercayaan publik dapat terbangun serta menciptakan tata kelola yang baik.

- a. Peningkatan integritas dan kejujuran
- b. Penguatan akuntabilitas dan transparansi
- c. Peningkatan kepercayaan publik
- d. Pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab
- e. Penegakan hukum yang adil dan non diskriminasi
- f. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur

5. TERDEPAN:

Menjadi pelopor dalam inovasi, mutu dan keunggulan dengan menetapkan standar tinggi dalam pembangunan dan menjamin kualitas terbaik dalam semua aspek untuk membangun keunggulan dan kepercayaan yang tinggi.

- a. Inovasi berkelanjutan
- b. Kualitas terbaik
- c. Keunggulan operasional
- d. Pengembangan sumber daya manusia
- e. Kepimpinan dan pengaruh
- f. Performance excellence

BAB II

OVERVIEW

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. PERMASALAHAN

1. Kesehatan

- a. Terbatasnya Akses terhadap fasilitas layanan kesehatan
- b. Kurangnya kualitas, kompetensi SDM dan kelengkapan peralatan layanan kesehatan
- c. Tingginya prevalensi dan kasus penyakit menular, tidak menular dan masalah kesehatan
- d. Tingginya angka kematian ibu melahirkan, kelahiran bayi dan prevalensi anak stunting dan kurang gizi.
- e. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran warga terhadap PHBS dan pencegahan penyakit

2. Pendidikan

- a. Relatif rendahnya kualitas, sarana prasarana dan akses pendidikan
- b. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan, perdesaan dan daerah terpencil.
- c. Kurangnya penghargaan dan insentif bagi tenaga guru daerah terpencil yang dapat mengurangi motivasi kerja.

3. Pertanian

- a. Rendahnya produktifitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan serta Kurangnya penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian yang tidak efisien menyebabkan rendahnya hasil panen.
- b. Keterbatasan akses terhadap benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian yang berkualitas.
- c. Degradasi kualitas tanah akibat penggunaan berlebihan, erosi, dan pencemaran.
- d. Tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-agrikultur.

- e. Kurangnya edukasi, penyuluhan dan pelatihan keterampilan teknis dalam penerapan teknologi modern dan praktik pertanian yang baik.
- f. Serangan hama dan penyakit tanaman yang tidak tertangani dengan baik.

4. Pariwisata.

Ditandai masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan, selain kurangnya perhatian untuk penataan destinasi, atraksi, daya tarik wisata lainnya, termasuk kurangnya perhatian terhadap pengembangan desa wisata. Hal ini disebabkan:

- a. Kurangnya infrastruktur penunjang seperti jalan, toilet umum, transportasi, listrik, penerangan jalan, air bersih dan pengelolaan sampah serta keterbatasan amenities menjadi penghambat utama pengembangan pariwisata sehingga akses ke objek wisata menjadi sulit dan kurang menarik bagi wisatawan.
- b. Minimnya promosi dan pemasaran termasuk belum efektifnya pemanfaatan teknologi digital
- c. Rendahnya kualitas SDM pariwisata
- d. Diabaikannya kelestarian lingkungan menyebabkan kerusakan alam dan degradasi lingkungan di sekitar objek wisata sehingga bisa mengurangi daya tarik wisata dalam jangka panjang.
- e. Kurangnya keunikan dan identitas destinasi
- f. Belum terbangunnya rasa aman dan nyaman bagi wisatawan dibuktikan dari masih terjadinya gangguan keamanan dan kasus kriminal yang dialami wisatawan.

5. Usaha Kecil, Menengah dan Industri Rumah Tangga

- a. Keterbatasan akses modal
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena belum masifnya pelatihan keterampilan usaha
- c. Rendahnya daya saing, inovasi produk dan keterbatasan akses pasar

6. Lingkungan Hidup

- a. Masih tingginya pencemaran dan polusi udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan, pembakaran lahan dan sampah, serta pencemaran air oleh limbah domestik, industri, dan pertanian.
- b. Penurunan kualitas tanah akibat penggunaan berlebihan, konversi lahan untuk pertanian, pertambangan dan aktivitas lainnya.
- c. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah berupa tempat penampungan sampah, fasilitas pemrosesan, dan sistem pengangkutan sampah yang tidak memadai.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengelolaan sampah rumah tangga.
- e. Terjadinya perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan bencana alam sebagai dampak dari perubahan iklim global.
- f. Kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku kasus pelanggaran kebijakan lingkungan yang menyebabkan pelanggaran berkelanjutan.

7. Keterbukaan Informasi Publik

- a. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pejabat publik tentang pentingnya keterbukaan informasi publik
- b. Fasilitas teknologi informasi seringkali tidak memadai untuk mendukung keterbukaan informasi publik, kurangnya akses internet, website pemerintah yang kurang aktif, dan sistem manajemen informasi yang ketinggalan menyebabkan penyebaran informasi tidak efektif.
- c. Proses administrasi untuk memperoleh informasi publik seringkali sangat rumit dan memakan waktu, prosedur yang panjang dan membingungkan untuk mendapatkan informasi yang seharusnya mudah diakses.
- d. Masih adanya budaya takut terhadap pengawasan dan kritik yang muncul dari masyarakat.

- e. Kurang transparan dalam mengelola dana publik, proyek pembangunan, dan pelayanan publik menyebabkan informasi tentang penggunaan anggaran dan kegiatan pemerintahan tidak dibuka secara lebar.

8. Kemiskinan

- a. Kurang valid, akuratnya dan mutakhirnya data penduduk miskin tanpa dilengkapi dengan koordinat tempat tinggal serta jumlah dan jenis bantuan yang diterimanya.
- b. Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk program pengentasan kemiskinan sehingga program-program yang dilaksanakan tidak dapat menyentuh semua kalangan miskin.
- c. Masyarakat miskin seringkali kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan layanan kesehatan yang memadai.
- d. Tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya peluang kerja, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil, membuat masyarakat sulit memiliki penghasilan yang mencukupi.
- e. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar
- f. Kurangnya efektifnya kolaborasi antar pihak (pemerintah, lembaga donor, perusahaan, volunteer, BAZNASDA dan filantropi) dalam penanganan kemiskinan,

9. Reformasi Birokrasi

- a. Kualitas dan kompetensi SDM birokrasi
- b. Budaya birokrasi yang kurang adaptif
- c. Posisioning dan penempatan personil
- d. Tata kelola birokrasi kurang memadai termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik mengakibatkan kinerja birokrasi menjadi lemah.
- e. Prosedur administrasi yang panjang dan rumit menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan publik.

10. Kemandirian Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Rendahnya rasio PAD terhadap APBD dan tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pusat
- b. Perencanaan anggaran yang tidak komprehensif dan tidak sesuai kebutuhan prioritas daerah.
- c. Kurangnya perluasan dan diversifikasi sumber pendapatan daerah,
- d. Tingginya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi tepat waktu
- e. Kurangnya efektivitas dalam pungutan pajak dan retribusi yang mempengaruhi pendapatan daerah.
- f. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang menghambat pengawasan publik.
- g. Potensi fraud (kecurangan) dalam penyalahgunaan anggaran yang mengurangi efektivitas penggunaan dana.
- h. Belanja yang tidak berorientasi pada prioritas pembangunan yang mendesak.

Masalah-masalah terkait lainnya:

1. Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman
2. Ketentraman dan Ketertiban
3. Sosial
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
6. Perhubungan
7. Komunikasi dan Informatika
8. Penanaman Modal
9. Tenaga Kerja
10. Kepemudaan dan Olahraga
11. Koperasi, Perindustrian, Perdagangan

B. ISU STRATEGIS

ISU STRATEGIS PEMETAAN LOMBOK BARAT HEBAT

1. Sektor Kesehatan
2. Sektor Pendidikan
3. Sektor Pertanian dalam arti luas
4. Sektor Pariwisata Berkelanjutan
5. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Pengelolaan SDA, lingkungan hidup dan persampahan
7. Keterbukaan Informasi Publik
8. Pengentasan kemiskinan, ketimpangan dan perluasan kesempatan kerja
9. Kemandirian dan keberdayaan fiskal daerah
10. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan

BAB III

MISI LOMBOK BARAT HEBAT

MISI LOMBOK BARAT HEBAT TAHUN 2025-2029:

1. MISI KESEHATAN UNTUK SEMUA.

Bertujuan menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera bagi semua, melalui penyediaan akses layanan kesehatan yang adil, terjangkau dan bermutu bagi semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis.

Memastikan bahwa semua warga memperoleh layanan kesehatan yang setara dengan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Menggunakan pendekatan preventif dan promotif dalam pencegahan dan promosi kesehatan melalui pendidikan masyarakat, vaksinasi, dan program kesehatan lingkungan, serta menjadikan kesehatan sebagai tanggung jawab bersama.

2. MISI PENDIDIKAN BERKUALITAS, SETARA DAN BERKEADILAN

Menekankan pada pencapaian kualitas, kesetaraan, dan keadilan bagi semua peserta didik, bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas, kompeten, dan berdaya saing.

Memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memperoleh akses yang setara untuk pendidikan dasar sesuai kewenangan pemerintah kabupaten, termasuk memastikan pendidikan yang inklusif dengan menyediakan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, serta menjamin kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan.

3. MISI REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN

Berorientasi pada pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas, dan kelestarian lingkungan, peningkatan daya saing produk pertanian untuk mencapai pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian dengan mendorong adopsi teknologi modern, praktik pertanian berkelanjutan, dan inovasi agroteknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman, peternakan, dan perikanan, serta meningkatkan efisiensi produksi.

Mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengutamakan pelestarian tanah, air, dan keanekaragaman hayati, serta mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya.

Pengembangan agroindustri dan nilai tambah mendukung pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan, pengemasan, dan pengembangan produk turunan yang berdaya saing di pasar nasional dan global.

Ketahanan pangan dan kedaulatan pertanian menciptakan sistem pertanian yang mandiri dan tangguh terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian global, dengan meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memperkuat kedaulatan petani di negara ini.

4. MISI REVITALISASI SEKTOR PARIWISATA

Fokus pada pengembangan dan penataan destinasi, penyiapan destinasi baru, peningkatan jumlah kunjungan dan pengalaman wisatawan, penguatan ekonomi lokal dan berbasis pada kelestarian alam dan budaya lokal, inklusivitas, dan inovasi untuk menjamin pertumbuhan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan memberikan jaminan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal

Meningkatkan daya saing destinasi wisata dan mengembangkan destinasi wisata unggulan dengan meningkatkan infrastruktur, amenities, dan layanan yang mendukung pengalaman wisatawan, serta mempromosikan keberagaman budaya, alam, dan warisan sejarah lokal.

Memastikan pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan, mengembangkan praktik pariwisata yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian alam, kebersihan lingkungan, dan melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam dan budaya lokal.

5. MISI REVITALISASI DAN PEMBERDAYAAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) YANG MELIBATKAN PONDOK PESANTREN, KAUM MILENIAL, PEREMPUAN, DAN IBU RUMAH TANGGA

Membutuhkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, berorientasi pada peningkatan kapasitas, inklusivitas, dan kesejahteraan, sehingga UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian yang kuat dan berkelanjutan.

Memberdayakan pondok pesantren sebagai pusat ekonomi lokal mendorong pondok pesantren untuk menjadi sentra pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, dan kerjasama dengan UMKM di sekitarnya, sehingga mampu berkontribusi pada perekonomian lokal.

Mengoptimalkan peran kaum milenial dalam pengembangan UMKM menginspirasi dan membimbing kaum milenial untuk terlibat aktif dalam wirausaha melalui pelatihan digital marketing, teknologi, dan inovasi produk, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan ekonomi kreatif.

Meningkatkan partisipasi perempuan dan ibu rumah tangga mendorong perempuan dan ibu rumah tangga untuk berwirausaha dengan memberikan akses terhadap modal, pelatihan kewirausahaan, dan mentoring, sehingga mereka dapat mengembangkan UMKM yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Mendorong kolaborasi dan kemitraan strategis memfasilitasi kemitraan antara UMKM, koperasi, pondok pesantren, lembaga keuangan, dan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan menciptakan jaringan distribusi produk yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Mengembangkan produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, desain, dan pengemasan, sehingga dapat bersaing di pasar lokal dan internasional, serta mempromosikan produk-produk yang mengangkat nilai budaya dan potensi lokal.

6. MISI REVITALISASI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Fokus pada perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.

Kerjasama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemenuhan komitmen terhadap kelestarian lingkungan. Revitalisasi sektor lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan harus dilakukan dengan penekanan pada inklusivitas, kearifan lokal, dan teknologi ramah lingkungan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Meningkatkan kelestarian lingkungan melalui konservasi alam melindungi dan memulihkan ekosistem alam, termasuk hutan, lahan basah, dan kawasan pesisir, dengan fokus pada kelestarian biodiversitas dan pengurangan deforestasi, untuk menjamin keseimbangan alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Mengimplementasikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan mendorong pengelolaan sampah yang terintegrasi, meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, reuse (penggunaan ulang), recycling (daur ulang), dan peningkatan pengelolaan sampah secara modern untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (tpa).

Mendorong pengurangan dan pengelolaan sampah plastik dengan meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong produksi dan konsumsi produk ramah lingkungan dengan memperluas kebijakan reduksi sampah plastik, pelatihan pengelolaan sampah, dan kampanye kesadaran masyarakat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah melalui program edukasi, sosialisasi, dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Mengadaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan meningkatkan kesiapan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim untuk pengurangan risiko bencana, dan upaya mitigasi untuk meminimasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

7. MISI REVITALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Revitalisasi keterbukaan informasi publik harus didukung oleh komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Meningkatkan transparansi pemerintah daerah memastikan semua informasi publik yang relevan, termasuk anggaran, penggunaan dana, kebijakan, dan pelayanan publik, dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terbuka melalui platform digital dan media tradisional.

Memperkuat infrastruktur digital dan teknologi informasi mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik, dengan membangun portal informasi publik yang terintegrasi dan mudah diakses.

Membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas di pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi publik dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

8. MISI MEREDUKSI KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN

Menggunakan pendekatan holistik, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengatasi kemiskinan secara mandiri.

Diimplementasi melalui kerjasama multi-sektoral (pemerintah, swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat) secara holistik, berkelanjutan, dan berbasis data untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berdampak signifikan dan berkelanjutan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan membangun ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan pendapatan dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan mengembangkan kewirausahaan melalui program pelatihan, pendidikan kejuruan, dan akses pembiayaan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Memperkuat program jaring pengaman sosial, termasuk bantuan tunai, subsidi, dan asuransi kesehatan, untuk melindungi kelompok rentan dari risiko kemiskinan, serta membantu mereka bertransisi menuju kehidupan yang mandiri.

Memperkuat kebijakan dan layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua dengan memperluas akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, dan perbaikan gizi, untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

Mendorong keadilan ekonomi dan pengurangan ketimpangan dengan meningkatkan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi secara merata dengan kebijakan pajak yang progresif, program kredit mikro, dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.

1. MISI PENGUATAN REFORMASI DAN REVITALISASI BIROKRASI,

Menekankan pada peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi di lingkungan birokrasi. Untuk mencapai misi ini, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah, pemimpin lembaga, dan ASN untuk mendorong perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Program reformasi birokrasi harus berorientasi pada hasil, memenuhi harapan masyarakat, serta menjamin pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dengan mendorong proses kerja yang lebih efisien dan berkualitas melalui penyederhanaan prosedur administrasi, penataan kelembagaan, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan penerapan sistem manajemen kinerja berbasis hasil.

Membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik, dengan membuka akses informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas dengan mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik, dengan membangun etos kerja yang tinggi, peningkatan kapasitas aparatur, serta menjaga nilai-nilai integritas dan profesionalisme.

Memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga integritas dan transparansi di seluruh tingkat birokrasi, serta menegakkan hukum dengan adil dan tegas terhadap setiap pelanggaran, korupsi, dan penyimpangan.

2. MISI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERDAYA

Pendekatan yang terintegrasi, transparan, dan inovatif akan menjamin pengelolaan keuangan yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan dan adil melalui penguatan kapasitas keuangan daerah, efisiensi pengelolaan anggaran, dan optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah, DPRD, swasta, dan masyarakat dalam mengelola keuangan daerah dengan berorientasi pada kemandirian fiskal dan daya saing daerah.

Mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperkuat kapasitas daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber PAD dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjamin pemanfaatan anggaran daerah yang efisien, efektif, dan transparan dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta menerapkan manajemen berbasis kinerja untuk memaksimalkan hasil penggunaan anggaran.

Mendorong inovasi pengelolaan keuangan daerah mengembangkan inovasi dan strategi keuangan yang kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital, serta diversifikasi sumber pendapatan.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan keuangan.

BAB IV

PROGRAM aKSI PRIORITAS DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. PROGRAM AKSI KESEHATAN UNTUK SEMUA

Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan seluruh warga mendapat layanan kesehatan memadai dan berkelanjutan:

- a. Peningkatan fasilitas kesehatan primer (RS, puskesmas dan klinik), penyediaan *mobile health clinics* untuk menjangkau daerah terpencil.
- b. Peningkatan kualitas dan jumlah SDM kesehatan, pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil, penggunaan teknologi telemedis untuk mendukung diagnosa dan konsultasi kesehatan (replikasi aplikasi halodoc).
- c. Program kesehatan ibu dan anak dengan mengaktifkan peran posyandu dalam memantau kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita.
- d. Pemberian suplemen gizi dan pelayanan kesehatan gratis untuk bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
- e. Pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mencegah penyakit menular demam berdarah, TBC, dan diare.
- f. Peningkatan deteksi dini penyakit kronis dengan melaksanakan skrining rutin untuk mendiagnosis penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung sejak dini.
- g. Layanan kesehatan gratis dan/atau subsidi untuk golongan rentan (masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas).

2. PROGRAM AKSI PENDIDIKAN BERKUALITAS, SETARA DAN BERKEADILAN

Fokus pada peningkatan akses, kualitas pengajaran, dan fasilitas pendidikan untuk memastikan anak-anak usia sekolah memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau.

- a. Program sekolah gratis (bantuan seragam, biaya transportasi, buku, alat tulis dan perlengkapan sekolah) untuk siswa tidak mampu.
- b. Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi atau siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

- c. Pembangunan sekolah sederhana di daerah terpencil, dan meningkatkan akses transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah.
- d. menyediakan insentif untuk guru di daerah terpencil dan tertinggal.
- e. Menyediakan fasilitas pendukung sekolah seperti toilet, kantin, dan area bermain yang aman dan nyaman.
- f. Memperkuat pengajaran karakter yang menekankan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan gotong royong.
- g. Memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat dan minat siswa, seperti kegiatan seni, olahraga, dan sains.
- h. melibatkan perusahaan dan organisasi untuk mengadopsi sekolah dan menyokong pembangunan fasilitas atau program pendidikan.

3. PROGRAM AKSI SEKTOR PERTANIAN

a. PERTANIAN TANAMAN PANGAN

- Peningkatan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan teknologi sistem irigasi otomatis, pupuk terintegrasi, dan pestisida ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil panen.
- menyediakan varietas tanaman bermutu tinggi dan tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim melalui kerjasama dengan lembaga penelitian.
- Pelatihan dan edukasi petani (pelatihan budidaya modern, manajemen pertanian, dan teknik pengolahan hasil pertanian)
- Perbaikan irigasi dan sumber air dengan membangun dan memperbaiki sistem irigasi, embung, dan infrastruktur pendukung air untuk meningkatkan kestabilan pasokan air.
- Mendirikan fasilitas penyimpanan yang memadai seperti gudang untuk mencegah kerugian hasil pertanian akibat rusak atau busuk.
- Kerjasama dengan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

- Dukungan modal dan kelembagaan petani dengan menyediakan skema pembiayaan terjangkau dengan suku bunga rendah, mendorong pembentukan koperasi petani untuk menghimpun sumber daya, meningkatkan daya tawar, dan mempermudah akses ke modal dan teknologi.
- Penerapan praktik pertanian ramah lingkungan (pertanian organik, rotasi tanaman, dan pengelolaan hama terpadu)
- Mengembangkan strategi untuk mengatasi perubahan iklim, seperti varietas tahan iklim dan praktik pertanian yang menyesuaikan dengan kondisi iklim.

b. PERIKANAN DAN KELAUTAN

- Konservasi dan rehabilitasi ekosistem maritim dengan mendirikan kawasan konservasi maritim untuk melindungi habitat kelautan seperti terumbu karang, padang alga, dan mangrove.
- Menerapkan sistem perikanan yang berkelanjutan dengan mengatur quota tangkap, melarang penangkapan ilegal, dan menerapkan metode tangkap yang ramah lingkungan.
- Rehabilitasi dan restorasi dengan menangani kerusakan ekosistem laut seperti polusi, kerusakan terumbu karang, dan erosi pantai.
- Menyediakan fasilitas pemrosesan dan penyimpanan hasil laut seperti gudang beku dan pabrik pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan menjaga kesegaran produk.
- mendukung budidaya tanaman pantai dan rehabilitasi lahan pesisir.
- menyelenggarakan pelatihan teknik budidaya perikanan, teknologi penangkapan dan praktik pengelolaan berkelanjutan.
- Pemberdayaan komunitas pesisir dengan memberi bantuan modal, teknologi, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan erta mendorong pembentukan koperasi perikanan untuk meningkatkan daya tawar, menghimpun sumber daya, dan mempermudah akses ke modal.
- Kolaborasi dengan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan kelautan.
- Partisipasi komunitas pesisir dalam perencanaan dan implementasi program untuk menjamin program berkelanjutan dan relevan.

c. PENGEMBANGAN KOMODITI TANAMAN PERKEBUNAN DAN LAHAN KERING

- Mengembangkan varietas tanaman yang tangguh dan cocok untuk lahan kering, penyakit, dan hama, serta memiliki kualitas produk yang tinggi.
- Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong untuk budidaya tanaman komoditi ekonomis seperti buah, sayur, tanaman obat, rempah dan perkebunan produktif.
- Penerapan teknologi budidaya dengan penggunaan irigasi tetes (drip), fertilisasi terintegrasi dan pengelolaan pestisida ramah lingkungan.
- Penyuluhan dan pelatihan petani terkait praktik budidaya modern, teknik perawatan tanaman, dan metode pengelolaan lahan kering.
- Rehabilitasi lahan kering dengan penerapan metode konservasi tanah seperti penutup tanah dan rotasi tanaman.
- Pembentukan koperasi perkebunan untuk menghimpun sumber daya, meningkatkan daya tawar, dan mempermudah akses ke modal dan teknologi.
- Skema pembiayaan dan insentif dengan menyediakan kredit dengan suku bunga rendah atau insentif/subsidi lain untuk membantu petani dan ibu rumah tangga.
- Menjalin Kerjasama dengan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.
- Kolaborasi multi-pihak dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, LSM dan perguruan tinggi untuk menyusun dan melaksanakan program pengembangan perkebunan.

d. PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN BUAH UNGGULAN

- Pengembangan produk buah unggulan melalui pengembangan dan penyebaran varietas buah unggulan yang memiliki kualitas tinggi, tahan terhadap penyakit, dan tinggi hasilnya.
- Penerapan teknologi budidaya modern menggunakan teknologi irigasi tetes, fertilisasi terintegrasi, dan pengelolaan hama yang ramah lingkungan.
- Inovasi dalam budidaya dengan untuk meningkatkan kualitas dan hasil buah, seperti metode organik atau pertanian presisi.

- Memfasilitasi penyediaan infrastruktur untuk memproses buah, gudang penyimpanan, pengolahan, pengemasan yang menjamin kualitas dan kesegaran.
- Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan teknik budidaya, pengelolaan kualitas, dan teknik panen efektif.
- Pembentukan koperasi untuk menghimpun sumber daya, meningkatkan daya tawar, dan mempermudah akses ke modal dan teknologi.
- menyediakan kredit dengan suku bunga rendah, subsidi atau insentif lain untuk membantu petani membeli benih dan alat produksi.
- Pengelolaan risiko dan adaptasi perubahan iklim untuk menyesuaikan praktik budidaya dengan perubahan kondisi iklim, seperti varietas lahan kering dan metode budidaya yang efektif.
- Kolaborasi multi-pihak dengan pemerintah daerah, swasta, LSM, dan perguruan tinggi untuk menyusun dan melaksanakan program pengembangan produk buah unggulan.

4. PROGRAM AKSI SEKTOR PARIWISATA

- Pengembangan dan promosi destinasi wisata unggulan dengan meningkatkan daya tarik destinasi wisata utama dengan penambahan fasilitas, infrastruktur, dan atraksi tambahan.
- Pengembangan wisata berbasis budaya dan alam dengan memasarkan keunikan budaya lokal, adat istiadat, kuliner, dan keindahan alam sebagai daya tarik utama.
- Pengembangan kawasan ekowisata dan desa wisata berbasis lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian alam.
- Mendorong tumbuhnya akomodasi dan fasilitas penunjang berbasis komunitas lokal untuk membangun homestay, restoran sederhana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan milenial yang lebih memilih wisata dengan low budget dan ekonomis.
- Pengembangan infrastruktur digital yang cepat dan stabil di destinasi wisata untuk mendukung promosi dan informasi wisata.
- Strategi pemasaran dan promosi yang efektif melalui pemanfaatan media sosial dan digital marketing melalui website, dan aplikasi mobile untuk promosi destinasi wisata secara kreatif dan interaktif.

- Kolaborasi dengan influencer, travel blogger dan content creator untuk mengunjungi dan mempromosikan destinasi wisata melalui konten mereka.
- Penyelenggaraan event dan festival budaya, kuliner, dan kegiatan sport tourism yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional.
- Kerjasama dengan agen perjalanan dan tour operator untuk menyusun paket wisata menarik.
- Kemitraan dengan pihak swasta dan investor untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas wisata dan akomodasi.
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata di Lombok Barat.
- Pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kemampuan di bidang wirausaha, hospitality, dan pengembangan produk lokal.
- Pengembangan produk UMKM, kerajinan tangan dan kuliner untuk menambah pengalaman berwisata.
- Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi untuk menciptakan rasa memiliki, peningkatan pendapatan dan menjamin keberlanjutan.
- Peningkatan keamanan, kenyamanan dan keselamatan berwisata
- Melakukan adaptasi destinasi dan program wisata untuk menyesuaikan dengan tren terbaru dan perubahan preferensi wisatawan.

- REVITALISASI DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

- Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal melalui pelatihan kewirausahaan dan hospitality untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pariwisata, hospitality, dan pengembangan produk lokal.
- Revitalisasi peran, kreativitas dan inovasi kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang bertanggung jawab atas pengelolaan destinasi, aktivitas, dan pelayanan wisata
- Penataan kelembagaan dan organisasi melalui pembenahan kelompok sadar wisata, pemilihan pengurus dan pengelola desa wisata yang lebih terbuka dan berbasis kompetensi
- Pengembangan produk dan atraksi wisata unggulan dengan mengidentifikasi pengembangan keunikan lokal berupa budaya, tradisi, kerajinan, dan keunikan alam desa yang dapat dijadikan atraksi wisata.
- Wisata budaya dan edukasi dengan menyelenggarakan kegiatan budaya seperti upacara adat, tarian tradisional, dan workshop kerajinan lokal yang dapat menarik wisatawan untuk belajar dan terlibat langsung.
- Inovasi dan diversifikasi produk wisata alam dan ekowisata berbasis diferensiasi, kekuatan dan keunggulan karakteristik desa, melalui pemetaan atraksi wisata desa seperti trekking, agrowisata, area berkemah, telusur hutan dan persawahan, menanam dan petik sayur, menanam padi, *river tubing*, arung jeram, atraksi kebugaran/jelajah desa, kegiatan outdoor lainnya yang mendukung kelestarian lingkungan.dll
- Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur jalan ke dan dari desa wisata dan mendorong dibukanya jalur sarana transportasi menuju desa wisata untuk memudahkan akses wisatawan.
- Pengembangan fasilitas pendukung seperti penginapan (homestay) milik masyarakat lokal meskipun hanya satu kamar, restoran, toilet umum, area parkir, dan pusat informasi.
- Bekerjasama dengan provider telekomunikasi agar terbangun koneksi digital yang stabil dan memadai untuk membantu promosi dan memberikan informasi yang cepat kepada wisatawan.
- Pemanfaatan media digital website, media sosial, dan aplikasi mobile untuk memasarkan desa wisata, membagikan informasi, dan menampilkan kegiatan yang dapat dinikmati oleh wisatawan.
- Kolaborasi dengan influencer, travel blogger dan media untuk mengunjungi desa wisata dan mempromosikannya melalui konten yang dibuat.

- Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menerapkan praktik pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk menjaga kelangsungan alam desa.
- Pendidikan lingkungan bagi wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal selama berkunjung.
- Komitmen terhadap nilai-nilai lokal dengan tetap menjaga budaya, tradisi, dan adat lokal agar tidak terganggu oleh aktivitas wisata.
- Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata (POLTEKPAR dan STIPAR Lombok dan Perguruan tinggi) untuk pemetaan potensi unggulan desa
- Pembangunan dan pembenahan fasilitas umum dan amenitas seperti akses jalan, toilet umum, tempat wudhu dan sholat, tempat sampah terpadu, jalan setapak, dan kebersihan lingkungan
- Penataan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan desa
- Penyediaan sarana akomodasi sederhana seperti homestay, penyewaan kamar rumah warga, dan camping ground
- Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan perusahaan, LSM, pelaku usaha dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan, pengembangan paket wisata, penjualan produk lokal, dan peningkatan fasilitas dan promosi.
- Pemasaran dan promosi desa wisata berbasis digital, antara lain melalui media sosial, website dan menyiapkan narasi tentang tiap sudut desa menggunakan barcode interpretasi.
- Penggunaan sistem pembayaran non-tunai, selain dengan pembayaran konvensional
- Mengalokasikan pembiayaan melalui pola *blended finance*, melalui APBN/APBD Prov/APBD Lobar, KPBU dan pembiayaan dari lembaga donor.

5. PROGRAM AKSI SEKTOR USAHA KECIL, MENENGAH DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

- Peningkatan keterampilan dan kompetensi melalui pelatihan untuk produksi, desain , dan kualitas produk serta pelatihan manajerial untuk meningkatkan kemampuan mengelola bisnis
- Akses ke modal dan pembiayaan melalui pengembangan skema kredit yang kompetitif berbunga rendah dan prosedur yang mudah untuk membantu pelaku usaha mendapatkan modal usaha, kemitraan dengan dengan investor, kolaborasi dengan perusahaan besar melalui program CSR dan fasilitasi pelaku usaha untuk memanfaatkan platfrom *crowdfunding* dan modal ventura sebagai sumber pembiayaan alternatif.
- Inovasi dan pengembangan produk sesuai kebutuhan dan tren pasar melalui kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi.
- Membantu teknis pengemasan, pelabelan dan sertifikasi halal dan informasi nilai gizi untuk menarik konsumen.
- Mendorong pelaku usaha untuk menggunakan teknologi produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, menggunakan teknologi digital untuk pemasaran online, *e-commerce*, dan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan daya saing serta mengembangkan program inkubator bisnis.
- Kolaborasi dengan retail modern dan platform *e-commerce* untuk memperluas akses produk UMKM ke pasar yang lebih luas.
- Pemberdayaan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta dan perusahaan besar untuk mendapatkan pembinaan, transfer teknologi, dan pasar yang lebih stabil.
- Kolaborasi dengan akademisi dan peneliti untuk pengembangan produk dan teknologi yang relevan.

a. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

- Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan variasi produk industri rumah tangga, penggunaan teknologi dan penyediaan mentor atau konsultan untuk membimbing industri rumah tangga dalam penerapan teknologi dan strategi bisnis.
- Pengembangan akses pasar dan plaform online untuk memperkenalkan produk-produk ke pasar yang lebih luas, pengembangan branding dan pengemasan, kemiitraan dengan ritel modern, supermarket, dan platform *e-commerce*.

- Dukungan teknis dan inovasi dengan menyediakan fasilitas produksi bersama (*shared facilities*) yang dapat digunakan bersama oleh industri rumah tangga untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, pengembangan inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk produksi, pemasaran, dan manajemen usaha.
- Dukungan keuangan dan permodalan, pinjaman bunga rendah, hibah, atau bantuan modal, mendorong partisipasi bank perkreditan rakyat (BPR) dan koperasi untuk menyalurkan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta menyediakan insentif pajak bagi industri rumah tangga yang mengikuti program pengembangan dan mampu meningkatkan omzet
- Kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewirausahaan dan inovasi, dan membentuk asosiasi atau forum komunikasi industri rumah tangga untuk penguatan jaringan dan pembagian pengetahuan.

b. PEMBERDAYAAN PERAN PEREMPUAN DAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

- Pelatihan dan pengembangan keterampilan pelaku usaha industri rumah tangga (membuat kerajinan tangan, pengolahan makanan, dan produk ramah lingkungan), *workshop* dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas produk dan inovasi
- Akses permodalan dan dukungan finansial dan pembiayaan khusus dengan bunga ringan, skema dana bergulir atau hibah untuk pengembangan usaha rumah tangga, mendorong kelompok simpan pinjam yang dilaksanakan oleh komunitas perempuan untuk menyokong modal usaha.
- Pengembangan jaringan pasar melalui platform digital, seperti e-commerce dan media sosial, pameran produk lokal secara berkala, membentuk koperasi produksi dan pemasaran yang dikelola oleh perempuan untuk mendukung distribusi dan penjualan produk secara kolektif.
- Pendampingan dan mentoring usaha yang melibatkan pengusaha sukses sebagai mentor untuk ibu rumah tangga yang baru memulai usaha, pendampingan mentor berbasis komunitas untuk mengawal pengembangan bisnis

- Penguatan aspek legalitas dan branding dengan mengurus perizinan usaha dan legalitas produk, seperti sertifikasi halal dan pirt (produksi industri rumah tangga), pendampingan dalam mengembangkan identitas brand produk yang kompetitif untuk menarik konsumen dan mendorong penggunaan kemasan menarik dan profesional untuk meningkatkan nilai jual produk.

c. PROGRAM WIRAUSAHA KAUM MILENIAL

- Pelatihan keterampilan kewirausahaan berbasis digital untuk membangun keterampilan digital, termasuk pemasaran online, e-commerce, dan manajemen media sosial, program magang dan pendampingan dari pengusaha sukses untuk mengembangkan pengalaman praktis dan jaringan bisnis.
- Akses permodalan dan pendanaan dengan bunga ringan khusus untuk wirausaha muda melalui program KUR atau kredit mikro dengan penjaminan pemerintah, menyediakan dana hibah untuk proyek inovatif yang dikembangkan oleh wirausaha muda, termasuk beasiswa untuk pelatihan lanjutan serta memfasilitasi *platform crowdfunding* untuk mendukung proyek-proyek wirausaha muda, serta membangun jaringan investor untuk menanamkan modal.
- Pengembangan jaringan bisnis dan pemasaran melalui inkubator bisnis dan startup hub untuk startup yang dikelola oleh kaum muda, dengan fokus pada pendampingan, akses pasar, dan kolaborasi.
- Marketplace lokal untuk produk pemuda untuk menampung dan memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh wirausaha muda,
- Menyediakan *co-working space* untuk pemuda yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi terbaru dan jaringan internet cepat untuk mendukung wirausaha muda mengembangkan bisnis, mendorong kolaborasi antar wirausaha muda, termasuk pertukaran ide, pengembangan produk bersama, dan peluang bisnis.
- Kolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk pelatihan dan akses teknologi bagi wirausaha muda, CSR kepada pemuda untuk mendukung pengembangan usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan modal awal, serta kemitraan dengan LSM dan lembaga dalam pemberian dukungan teknis dan pendanaan bagi program kewirausahaan pemuda.

6. PROGRAM AKSI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

a. PELESTARIAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN.

- Pemulihan hutan dan lahan kritis dengan reboisasi dan penghijauan lahan-lahan kritis untuk mengurangi erosi, menjaga keanekaragaman hayati dan mengembalikan fungsi ekosistem.
- Memproteksi area konservasi seperti hutan, laut, dan mengembangkan program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) untuk memastikan kualitas dan kuantitas sumber daya air terjaga secara berkelanjutan.
- Pengelolaan limbah padat dan cair dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan limbah serta membangun infrastruktur pengolahan limbah yang ramah lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara dengan menerapkan standar pengendalian pencemaran untuk industri, transportasi, dan sektor lainnya serta meningkatkan pengawasan terhadap sumber polusi.
- Pemberdayaan masyarakat dan pendidikan lingkungan di sekolah yang dintegrasikan kedalam kurikulum sekolah,
- Melibatkan masyarakat dalam program pengelolaan lingkungan seperti bersih-bersih sungai, penghijauan, dan pengelolaan sampah di tingkat kampung atau desa serta menyelenggarakan pelatihan dan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial.
- Membangun taman dan ruang-ruang terbuka hijau di ibukota Kabupaten dan Kecamatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tempat rekreasi warga, arena bermain anak-anak dan sebagai taman konservasi alam kota.
- Mendorong pembangunan infrastruktur penyerapan air seperti embung, dam, kolam dan sistem drainase yang mampu mengurangi risiko banjir dan kekeringan.
- Melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap pengujian emisi dan gas buang kendaraan bermotor.
- Memperkuat kolaborasi dan kerjasama multi-pihak (pemerintah, swasta, LSM, organisasi internasional dan komunitas) yang memiliki kepedulian tinggi dalam melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan.

b. PENGELOLAAN SAMPAH

- Pemberdayaan masyarakat dan edukasi pengelolaan sampah melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*), edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber (rumah tangga, sekolah, tempat kerja) serta pelibatan komunitas dan organisasi lokal untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.
- Penguatan regulasi dan kebijakan dengan menginisiasi penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah, penerapan sanksi bagi pelanggar dan insentif bagi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik serta penerapan kebijakan reduksi sampah plastik sekali pakai melalui pelarangan atau pembatasan penggunaan pada ritel modern, toko dan pasar.
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat penampungan sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- Pemanfaatan teknologi modern untuk pengelolaan sampah, termasuk pengolahan sampah menjadi energi (*waste-to-energy*), peningkatan sistem pengangkutan sampah yang terintegrasi dan efisien.
- Kerjasama antar-pihak (pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan sampah rumah tangga, kantor tempat usaha, dan berbasis industri dengan pola daur ulang.
- Pengembangan kemitraan dengan pihak internasional untuk teknologi dan pendanaan pengelolaan sampah.
- Inovasi pengelolaan sampah dengan pengembangan inovasi teknologi untuk pengurangan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah, menjalin kemitraan dengan startup atau perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi digital dalam pengelolaan sampah serta pengembangan program pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti bank sampah.

c. GERAKAN LOMBOK BARAT BERSIH

Gerakan Lombok Barat Bersih menggagas kembali inisiatif lama Jumat Bersih yang bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan, dan kualitas lingkungan, berfokus pada pengelolaan sampah, penghijauan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Melalui gerakan ini, diharapkan Lombok Barat menjadi kabupaten yang bersih, hijau, dan sehat, dengan masyarakat yang sadar lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, sekaligus dapat meningkatkan citra positif daerah dan menarik minat lebih banyak wisatawan dan investor

- Program gotong royong secara rutin di setiap desa, kelurahan, instansi pemerintah, tempat usaha, halaman rumah, sekolah, pondok pesantren, rumah ibadah dan obyek wisata untuk membersihkan lingkungan dan fasilitas umum.
- Menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, meliputi pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah.
- Melakukan kampanye, edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan pelestarian lingkungan.
- Melakukan penanaman pohon di area kritis dan penghijauan di sepanjang jalan, area wisata dan area publik.
- Kolaborasi multi-pihak untuk melaksanakan program kebersihan dan kelestarian lingkungan.

7. PROGRAM AKSI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

a. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPADA RAKYAT LOMBOK BARAT

Bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait kinerja pemerintah secara rutin kepada masyarakat sekaligus ikhtiar Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, membangun kepercayaan publik, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

- Penyusunan format laporan meliputi kinerja program kerja, anggaran, dan pencapaian serta tantangan dan solusi.
- Penggunaan media dan saluran komunikasi melalui media massa (radio, koran lokal, website resmi pemerintah, media sosial, dan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh masyarakat
- Pelaporan yang transparan dan partisipatif dengan memberi kesempatan publik untuk memberi umpan balik.
- Pelaporan berbasis data valid dan evidensi (bukti fakta) yang terverifikasi untuk menjaga kepercayaan publik terkait pelaksanaan program pemerintah.

- Menyertakan pemetaan masalah dan tantangan yang dihadapi beserta solusi atau tindakan yang telah dan akan diambil untuk menanganinya dan disajikan melalui grafik, infografis, dan peta untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap laporan.

b. MEMBANGUN MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL

Aplikasi ini ditujukan untuk menyederhanakan proses layanan publik, mempermudah akses masyarakat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga dapat menciptakan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan mudah sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

- Mengidentifikasi jenis layanan publik yang paling dibutuhkan masyarakat (pembuatan KTP, Kartu Keluarga, SIM, Sertifikat Tanah, izin usaha, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dan lain-lain).
- Merancang fitur-fitur untuk pendaftaran online, informasi layanan, tracking status pengajuan, pembayaran digital, dan sistem pengaduan serta merancang antarmuka yang mudah digunakan, ramah pengguna dan responsif untuk masyarakat dari berbagai kalangan.
- Pembangunan infrastruktur teknologi dengan memilih teknologi platform seperti mobile apps (*android dan ios*) dan web-based application yang terintegrasi dengan database milik daerah serta mengembangkan sistem yang mampu mengelola data pengguna, proses layanan, otorisasi akses serta memastikan integrasi aplikasi dengan sistem lain seperti dukcapil, perizinan, dan pembayaran untuk kemudahan pelayanan terpadu baik oleh OPD maupun Satker Vertikal di Kabupaten Lombok Barat.
- Penjaminan keamanan dan kerahasiaan data pengguna dan transaksi terlindungi dengan teknologi enkripsi.
- Kerjasama dan koordinasi antar dinas untuk mendukung integrasi data dan pelayanan yang komprehensif,
- Kolaborasi dengan penyedia teknologi untuk mendapatkan solusi teknologi terbaik dan mendukung operasional aplikasi serta memastikan pengembangan aplikasi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

8. PROGRAM AKSI MEREDUKSI KEMISKINAN SECARA BERKELANJUTAN

a. PENGURANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Melibatkan pemerintah, usaha swasta, lembaga BAZNAS Kabupaten, dermawan dan filantropi.

- Penyediaan data valid dan akurat melalui pemutakhiran data berkala dan penentuan koordinat domisili dan penertiban jenis dan jumlah bantuan
- Penyediaan kebutuhan dasar berupa bantuan pangan secara teratur bagi keluarga miskin, akses air bersih dan sanitasi, bantuan renovasi atau pembangunan rumah layak huni untuk keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak.
- Menyalurkan bantuan langsung tunai secara reguler untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Memberi subsidi kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan bahan bakar bagi keluarga miskin.
- Program pelatihan dan kewirausahaan untuk masyarakat miskin berdasarkan potensi lokal, seperti keterampilan teknis, kerajinan tangan, atau kewirausahaan serta bantuan modal dan pelatihan bisnis untuk membantu masyarakat miskin memulai usaha kecil yang dapat menjadi sumber pendapatan.
- Akses ke layanan kesehatan dengan: memberikan akses gratis atau bersubsidi untuk layanan kesehatan melalui BPJS kesehatan atau program jaringan pengaman kesehatan lainnya.
- Menyediakan layanan kesehatan keliling yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil atau keluarga yang tidak mampu untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
- Pendidikan dan beasiswa untuk anak-anak keluarga miskin agar tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Program literasi dan edukasi: mengadakan kelas belajar atau pendidikan non-formal untuk meningkatkan literasi dan keterampilan dasar bagi masyarakat miskin.
- Peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dengan menyediakan kredit mikro berbunga ringan untuk membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha kecil serta melibatkan keluarga miskin dalam koperasi simpan pinjam untuk membantu masyarakat dalam mengelola simpanan dan mendapatkan modal usaha.
- Memfasilitasi pendampingan dan binaan komunitas bagi keluarga miskin yang memiliki usaha kecil, agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik dan berkembang.

- Melibatkan masyarakat dalam program binaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kerja sama dan solidaritas sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan.
- Pemberdayaan perempuan melalui dukungan kewirausahaan dengan menyediakan program khusus untuk memberdayakan perempuan dalam bisnis rumah tangga atau usaha mikro serta menyelenggarakan pelatihan keterampilan khusus untuk perempuan seperti tata rias, kuliner, dan kerajinan tangan.
- Melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa berbasis partisipasi untuk meningkatkan kualitas hidup secara kolektif serta menghidupkan kembali budaya gotong royong untuk membantu masyarakat miskin dalam membangun atau memperbaiki rumah dan fasilitas umum.

b. MEREDUKSI KEMISKINAN DI DESA-DESA PESISIR

- Peningkatan keterampilan teknologi perikanan, pengolahan hasil laut, dan pemasaran produk laut bagi nelayan.
- Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan budi daya rumput laut, budi daya ikan, pengembangan pariwisata pesisir dan pantai, dan produk kerajinan lokal serta mendorong pembentukan dan penguatan koperasi nelayan untuk meningkatkan daya tawar, efisiensi, dan ketersediaan modal bagi para nelayan.
- Pengembangan **Silvo-fishery** dengan mengintegrasikan tanaman mangrove dan kolam ikan/udang secara berimbang, sehingga kedua komponen ini saling mendukung.
- Penguatan koperasi dan kelompok usaha
- Peningkatan infrastruktur dan layanan dasar, jalan dan akses ke pantai, pembangunan dermaga sederhana, air bersih, listrik dan bantuan alat tangkap bagi masyarakat pesisir.
- Layanan pendidikan dan kesehatan yang dekat dengan wilayah pesisir, serta menyediakan pelayanan kesehatan mobile untuk daerah yang terpencil.
- Pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha kecil berupa jasa akomodasi homestay dan warung khas hasil laut.
- Memberi perhatian khusus pada pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia melalui program pendidikan, pelatihan, dan bantuan modal.

- Pelibatan masyarakat dalam konservasi pesisir, seperti pengelolaan mangrove, terumbu karang, rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir lain untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan.
- Pengembangan ekowisata pantai, pesisir dan wisata bahari yang menguntungkan masyarakat lokal dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.
- Fasilitasi akses kredit dan permodalan dengan skema kredit mikro dan pendanaan khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah pesisir, serta mempermudah akses kepada lembaga keuangan.
- Menggunakan dana desa dan alokasi dana desa untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di desa-desa pesisir.
- Kerjasama dengan pihak swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.
- Penguatan kelembagaan dan pemerintahan desa dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa dan mengevaluasi kinerja program pengentasan kemiskinan.
- Kampanye kesadaran lingkungan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan dampak perubahan iklim terhadap kehidupan pesisir.
- Mendorong partisipasi generasi muda dalam upaya konservasi dan pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan edukatif dan pelatihan.
- Kolaborasi dan kemitraan multi-pihak (pemerintah, swasta, pelaku usaha, LSM, komunitas lokal dan masyarakat) dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
- Inovasi dan penelitian dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal desa pesisir.
- Pelatihan vocational dan keterampilan yang relevan dengan potensi lokal seperti pengolahan hasil laut, pertanian organik, dan kerajinan tangan.
- Pembentukan dan revitalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang berfokus pada pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal untuk menggerakkan ekonomi desa.

c. MEREDUKSI KEMISKINAN DI DESA-DESA LINGKAR HUTAN

- Pengembangan agroforestri bagi warga lokal lingkaran hutan yang mengintegrasikan pertanian dengan kehutanan dengan menanam tanaman pangan, tanaman semusim sayur mayur, tanaman obat, bunga, buah-buahan, dan kayu yang bermanfaat secara ekonomi untuk meningkatkan pendapatan warga.
- Mendorong pengelolaan dan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, rotan, bambu, dan tumbuhan obat untuk diolah dan dijual, sehingga menjadi sumber pendapatan tambahan.
- Pengembangan *silvo-pastur* yang mengintegrasikan peternakan dengan kehutanan yang dapat menghasilkan manfaat ganda, diversifikasi produk dengan menghasilkan kayu, buah, atau getah dari pohon, selain produk ternak seperti daging dan susu.
- Pemilihan jenis tanaman pakan ternak dan padang penggembalaan yang tepat akan meningkatkan manfaat ganda bagi masyarakat sekitar hutan.
- Pengembangan ekowisata berupa wisata trekking hutan, jelajah dan telusur hutan, pengamatan satwa dan kampung adat dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola dan pemandu (*tour guide*) untuk menambah pendapatan dari aktivitas wisata yang menghargai kelestarian alam.
- Legalisasi dan akses hukum berupa proses legalisasi hak pengelolaan perhutanan sosial bagi masyarakat lingkaran hutan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat serta menyiapkan mekanisme hukum yang jelas, rinci dan mudah dipahami agar masyarakat bisa mengelola hutan secara legal dan berkelanjutan.
- Pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema hutan desa, hutan adat, atau hutan kemasyarakatan untuk menjaga kelangsungan hutan dan meningkatkan kesejahteraan.
- Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan melibatkan masyarakat lokal untuk menanam pohon yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan meningkatkan cadangan karbon.
- Pelatihan konservasi dan pengelolaan lingkungan tentang praktik konservasi dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan.

- Peningkatan akses modal dan pasar, melalui nkredit mikro dan fasilitas pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah sekitar hutan, termasuk untuk pengembangan agroforestri dan usaha pengolahan hasil hutan.
- Pengembangan industri rumah tangga berbasis sumber daya lokal (kerajinan tangan, pengolahan hasil pertanian dan hutan) untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- Edukasi lingkungan dan konservasi dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan berkelanjutan dan dampak perusakan hutan terhadap lingkungan dan ekonomi.
- Pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) untuk meningkatkan skala produksi dan daya saing produk masyarakat.
- Penguatan kelembagaan desa dalam perencanaan, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan monitoring program pengentasan kemiskinan.
- Penguatan kerjasama dan kemitraan (Pemerintah, LSM, usaha swasta dan Perguruan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi melalui CSR, dana stimulus, alokasi khusus untuk pengentasan kemiskinan, konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam serta melibatkan peneliti dan pengembang teknologi dalam mengembangkan solusi teknologi yang sesuai untuk pengelolaan hutan dan usaha lokal.
- Konservasi lingkungan dan rehabilitasi ekosistem dengan melakukan reboisasi dan penanaman tanaman multifungsi untuk memperbaiki lahan yang terdegradasi di sekitar hutan serta menggali dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung konservasi hutan dan pemanfaatan sumber daya secara bijak.
- Penyuluhan dan edukasi lingkungan tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan dampak negatif perusakan hutan dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan hutan melalui program sekolah lapang dan kegiatan lokal.
- Program adopsi pohon untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung konservasi dan rehabilitasi hutan.

9. PROGRAM AKSI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERDAYA

Strategi kunci :

Pendapatan dimaksimalkan, belanja harus efektif, hemat dan fokus.

Strategi ini mencakup peningkatan efisiensi, diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan keuangan yang bijak, serta kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan PAD secara signifikan

a. PENDAPATAN DAERAH

- Peningkatan kapasitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergarap, meningkatkan teknologi dan sistem informasi untuk mempermudah proses pemungutan pajak dan retribusi;
- Melakukan pendataan dan pemetaan potensi wajib pajak dan retribusi, kreativitas dan inovasi pengelolaan sumber pendapatan serta peningkatan efisiensi dan ketaatan pajak dan retribusi
- Mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dari potensi lokal seperti pariwisata, kehutanan, produk ekonomi kreatif dan sumber daya alam lainnya.
- Modernisasi sistem pajak dengan mengimplementasikan sistem pajak berbasis digital untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak, menyederhanakan proses administrasi dan memberi edukasi kepada warga untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam membayar pajak serta meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
- Penyediaan insentif dan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta peningkatan kapasitas pemungutan pajak melalui digitalisasi dan automasi sistem pemungutan.

- Pemberdayaan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalisme BUMD dalam pengelolaan aset daerah, inovatif dalam mengelola bisnis sesuai potensi lokal, restrukturisasi BUMD yang tidak efisien dan fokus pada pengembangan bisnis yang profitable, transparansi pengelolaan BUMD, kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan unit usaha yang bisa meningkatkan pendapatan.
- Meningkatkan pengelolaan aset daerah seperti tanah, gedung, dan fasilitas publik yang dapat memberikan pendapatan melalui sewa atau kerjasama dengan pihak swasta
- Pendekatan *one-stop service* untuk memudahkan dan mempercepat proses layanan.

b. BELANJA DAERAH

- Prioritas program dan kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Tinjau ulang dan pangkas belanja yang tidak efektif dan arahkan untuk program yang lebih memberi manfaat signifikan.
- Mengelola utang daerah dengan hati-hati untuk menghindari beban keuangan yang berlebihan dan memastikan bahwa penggunaan utang dilakukan hanya untuk proyek-proyek yang memberikan hasil dan manfaat nyata.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan memperkuat sistem pengawasan keuangan dan audit untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien dan transparan.
- Efisiensi belanja operasional dengan menerapkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
- Melakukan review atas kewajaran pengeluaran operasional seperti biaya listrik, air, dan kebutuhan kantor.
- Pengendalian belanja pegawai dengan melakukan tata ulang struktur organisasi untuk mengurangi beban belanja berlebihan.
- Pengurangan belanja perjalanan dinas dengan meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti video konferensi.
- Penerapan budaya kerja yang fokus pada penghematan dan efisiensi di setiap unit kerja, termasuk hemat penggunaan listrik, air, dan bahan bakar minyak dalam aktifitas pemerintah.

c. KERANGKA PENDANAAN MELALUI STRATEGI PEMBIAYAAN CAMPURAN (*BLENDED FINANCE*)

Untuk menutupi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, selain pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat, APBD Provinsi, APBN, juga harus lebih keras diikhtirakan sumber pendanaan pembangunan melalui model *blended finance* yaitu strategi pembiayaan yang menggabungkan sumber dana publik, swasta, LSM dan lembaga donor dalam negeri dan asing, BAZNAS Kabupaten dan filantropi untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomis. Strategi ini membantu mengurangi risiko dan menarik investasi dari sektor swasta. Strategi ini memfokuskan pada membangun kerangka kerja yang solid untuk *blended finance*, menyusun skema pembiayaan yang efektif, mengatasi risiko, dan mengawasi implementasi proyek untuk menjamin kesuksesan dan dampak positif dari investasi campuran.

- Melakukan identifikasi tujuan pengembangan yang tepat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau lingkungan.
- Memilih sektor prioritas yang memiliki potensi impact besar dan kebutuhan pembiayaan yang signifikan.
- Menyusun rencana *blended finance* yang mencantumkan tujuan, strategi, dan metode implementasi.
- Mendefinisikan model pembiayaan campuran, seperti penyusunan paket pembiayaan, peran pemangku kepentingan, dan skema insentif.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan, insentif, dan jaminan.
- Melibatkan sektor swasta dengan menawarkan insentif, menyusun model bisnis yang menarik, dan menyediakan jaminan risiko.
- Kerjasama dengan LSM, organisasi non profit, lembaga donor dan filantropi untuk menyediakan dana pendampingan untuk mendukung proyek.
- Mendesain struktur pembiayaan yang menggabungkan dana publik, swasta, dan filantropi untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan.
- Penyusunan proyek yang solid dengan rencana yang jelas, termasuk target, biaya, dan jadwal implementasi.
- Implementasi proyek sesuai rencana dan mengawasi progresnya untuk menjamin kepatuhan terhadap tujuan dan budget.

- Pengawasan kinerja dengan melakukan monitoring reguler untuk menilai kinerja proyek dan menyusun laporan kemajuan.
- Melakukan evaluasi impact untuk mengukur sejauh mana proyek mencapai tujuan dan manfaat yang ditargetkan.
- Mengadopsi dan memodifikasi inovasi dalam *blended finance* untuk mengatasi tantangan dan memperbaiki kinerja.
- Melakukan penyesuaian strategi berdasarkan pengalaman, umpan balik, dan kebutuhan pasar yang berubah.

10. PROGRAM AKSI REFORMASI BIROKRASI

A. PROGRAM DAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penggunaan teknologi informasi dengan mengadopsi sistem *e-government*
- menerapkan layanan online untuk pengajuan perizinan dan pembayaran pajak daerah secara digital.
- Penyederhanaan proses bisnis dengan mengidentifikasi dan menghilangkan prosedur yang tidak perlu, *redundan/mubazir*, atau menghambat efektivitas. Pendekatan ini membantu mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan transparansi serta mempermudah pengurusan dokumen seperti perizinan, KTP, dan sertifikat tanah.
- Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ASN untuk meningkatkan kompetensi, kualitas pelayanan, dan etika kerja ASN untuk meningkatkan kualitas layanan publik
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi dan prestasi untuk mendorong budaya kerja lebih baik yang produktif.
- Penyederhanaan struktur organisasi dan mengurangi jenjang hirarki yang terlalu panjang untuk mencapai struktur yang lebih ramping dan lincah.
- Sistem pengawasan internal dan eksternal dengan memperkuat peran inspektorat kabupaten dan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- Membuka akses informasi publik untuk meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi publik terkait anggaran, program, dan pelayanan.

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan memperkuat mekanisme pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas untuk meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan membuka kesempatan kepada publik untuk melaporkan dugaan perilaku fraud dan cacat etika
- Implementasi sistem e-budgeting dan e-audit untuk pengelolaan anggaran dan pengawasan keuangan untuk mencegah penyimpangan.
- Forum musyawarah publik melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), konsultasi publik secara terbuka untuk menjaring aspirasi masyarakat.
- Pemberdayaan masyarakat dan pengguna layanan dalam proses penilaian kinerja layanan publik dan memberi masukan saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.
- Penghargaan kepada ASN yang berprestasi dan sanksi tegas kepada yang melakukan pelanggaran.

B. REVITALISASI DAN PERLUASAN PERAN CAMAT SEBAGAI BRIDGING SYSTEM

Peran dan posisi camat yang strategis sebagai jembatan penghubung antara Bupati dengan Kepala Desa/Lurah setelah otonomi daerah mengalami pergeseran posisi yang makin tidak jelas. Karenanya, pada level lokal sangat perlu direvitalisasi sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal, Camat dapat diberikan fungsi utama sebagai koordinator, fasilitator, dan pengawas pemerintahan desa/kelurahan.

Dengan revitalisasi dan perluasan peran camat sebagai jembatan antara Bupati dengan Kepala Desa/Lurah, Pemkab dapat mencapai koordinasi yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Revitalisasi Peran dan fungsi Camat:

- Mengkoordinasikan program pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa dan kelurahan untuk memastikan kebijakan Kabupaten diimplementasikan secara efektif dan sinergis, tanpa menganulir perencanaan desa yang sudah ditetapkan.
- Sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antar desa/kelurahan atau antara desa/kelurahan dengan pihak lain agar stabilitas dan harmoni di wilayahnya tetap terjaga.

- Memantau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di desa/kelurahan dan memberikan laporan berkala kepada bupati
- Mengawasi penggunaan dana desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta memberikan bimbingan untuk mengurangi risiko penyimpangan.
- Diberikan kewenangan tambahan untuk mengambil keputusan operasional terkait pengelolaan desa dengan pengawasan Bupati
- Koordinator untuk kerjasama antar lembaga di wilayahnya, mempermudah kolaborasi dan memfasilitasi kerjasama antara desa, swasta, dan instansi pemerintah.

PEMBIAYAAN:

1. Setiap kecamatan akan dialokasikan tambahan anggaran secara signifikan dalam rangka revitalisasi dan perluasan peran camat sebagai bridging system tersebut.
2. Untuk setiap kelurahan, juga akan dialokasikan dana tambahan sebagai bentuk kompensasi dari tidak diterimanya DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA , setidaknya setara dengan DD dan ADD yang diterima desa di Lombok Barat
3. Untuk setiap desa, akan dialokasikan tambahan anggaran dalam bentuk dana insentif desa untuk kegiatan operasional pengelolaan persampahan, pemberdayaan kaum muda desa, pemberdayaan BUMdes untuk pendampingan kegiatan produktif ibu rumah tangga dan masyarakat miskin dan BUMDes yang bergerak di pengelolaan persampahan.
4. Untuk setiap desa dan kelurahan, akan diberikan bantuan kendaraan angkutan sampah

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENCAPAIAN PROGRAM AKSI PRIORITAS:

Memperhatikan faktor-fktor kunci ini akan mampu membantu meningkatkan kemungkinan keberhasilan program aksi prioritas dan memastikan implementasi yang efektif untuk pencapaian hasil yang diharapkan.

Beberapa faktor kunci keberhasilan, antara lain:

- Perencanaan yang jelas dan terperinci dengan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah kerja yang jelas serta penetapan prioritas untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Alokasi sumber daya yang efektif dan memadai untuk mendukung implementasi program serta pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien.
- Partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses perencanaan dan implementasi serta kolaborasi antar institusi, organisasi, dan psekor untuk mencapai tujuan program.
- Peningkatan kapasitas tim yang melaksanakan program memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai serta pelatihan dan pengembangan apasitas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim.
- Sistem monitoring yang efisien untuk memantau kemajuan dan identifikasi masalah sejak awal serta evaluasi berkala untuk menilai kesusastaan dan efektivitas program.
- Kemampuan beradaptasi untuk menyesuaikan rencana dan strategi berdasarkan tantangan dan kondisi yang berubah serta responsif terhadap masalah yang muncul selama implementasi program.
- Memastikan komunikasi yang efisien antara semua pihak yang terlibat serta transparansi dalam proses implementasi dan pengelolaan program.
- Komitmen pemimpin politik dan pemerintah untuk meningkatkan kesuksesan implementasi serta memastikan penerapan kebijakan dan peraturan yang mendukung implementasi program.
- Mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi implementasi program serta menyusun strategi mitigasi untuk mengatasi risiko dan meminimalkan dampaknya.

HIGHLIGHT PROGRAM AKSI PRIORITAS:

1. GERAKAN LOMBOK BARAT MENGAJI
2. GERAKAN LOMBOK BARAT BERSIH
3. DANA INSENTIF BAGI TENAGA PENDIDIK DAERAH TERPENCIL
4. DANA INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAERAH TERPENCIL
5. DANA INSENTIF BAGI GURU NGAJI, MARBOT DAN PENJAGA RUMAH IBADAH
6. BANTUAN DAN FASILITASI BIAYA RESMI ADMINISTRASI PERNIKAHAN (KUA) UNTUK PERKAWINAN PERTAMA DAN MEMENUHI SYARAT UMUR BAGI PASANGAN MISKIN.
7. PENYESUAIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TPP) BAGI ASN DAN P3K
8. DANA INSENTIF BAGI SELURUH KECAMATAN DALAM RANGKA REVITALISASI DAN PERLUASAN PERAN CAMAT
9. DANA INSENTIF KELURAHAN, SETARA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
10. DANA INSENTIF DESA UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH DAN PEMBERDAYAAN BUMDES
11. KENDARAAN ANGKUTAN SAMPAH BAGI SETIAP DESA DAN KELURAHAN
12. DANA INSENTIF TAMBAHAN BAGI DESA PENGELOLA BUMDES TERBAIK
13. BIAYA KESEHATAN GRATIS DI FASKES BAGI WARGA MISKIN, TERLANTAR DAN MARJINAL
14. BANTUAN KHUSUS BAGI LANSIA, IBU HAMIL, IBU MENYUSUI DAN BALITA
15. INTERVENSI LANGSUNG DAN BANTUAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK STUNTING

16. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN ALAT PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI WARGA MISKIN DAN MARJINAL
17. KEMBALI BERSEKOLAH BAGI ANAK KELUARGA MISKIN DAN TERLANTAR
18. SUBSIDI BUNGA PINJAMAN DENGAN PAGU TERTENTU BAGI UKM
19. MENGINSTALASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
20. PENATAAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

BAB V

PRIORITAS KINERJA 99 HARI PERTAMA

1. GERAKAN LOMBOK BARAT MENGAJI
2. GERAKAN LOMBOK BARAT BERSIH
3. IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI DESA WISATA BERBASIS DIGITAL
4. PENETAPAN KEBIJAKAN 10 DESA WISATA MODEL
5. PENETAPAN KEBIJAKAN INOVASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK,
TERMASUK MENGINISIASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
6. EVALUASI DAN REVIEW APBD 2025 UNTUK IDENTIFIKASI ALOKASI INSENTIF BAGI
KELOMPOK-KELOMPOK PRIORITAS (KECAMATAN/DESA/KELURAHAN, PENDIDIK DAN NAKES
DAERAH TERPENCIL, KELOMPOK MISKIN, MARJINAL, LANSIA, IBU HAMIL, BALITA, IBU
MENYUSUI, WARGA MISKIN, GURU NGAJI, MARNBOT DAN PENJAGA RUMAH IBADAH)
7. MEMASTIKAN TERSEDIA ALOKASI ANGGARAN UNTUK PROGRAM AKSI PRIORITAS PADA APBD
PERUBAHAN TAHUN 2024 UNTUK

BAB VI

PENUTUP DAN MOHON RESTU

1. Dokumen ini memuat tekad, semangat, komitmen dan janji kami berdua untuk berkhidmat menjadi pengawal masyarakat Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan sebagian mimpi dan harapannya untuk meraih kehidupan yang lebih baik, bahagia dan sejahtera.
2. Visi, misi dan program aksi LOMBOK BARAT HEBAT ini disajikan sebagai salahsatu menu sajian yang dapat menjadi pertimbangan pemilih dalam melimpahkan amanah kepada Hj. Sumiatun dan Ibnu Salim untuk memimpin Kabupaten Lombok Barat, Insyaa Allah dari Tahun 2025 sampai Tahun 2029.
3. Kami berdua bukanlah makhluk-NYA yang sempurna, karena itu marilah membangun Kabupaten Lombok Barat dengan semangat kebersamaan, kesetaraan, kolaborasi dan saling melengkapi.
4. Akhirnya, kami sekaligus memohon doa dan restu masyarakat seluruhnya semoga kami diberikan kesempatan mulia untuk berkhidmat membangun Kabupaten Lombok Barat yang kita cintai ini. Insyaa Allah selalu ada jalan yang bertabur berkah bagi niat tulus ikhlas dan perbuatan baik.

LEBAR
HEBAT